

IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI DI DPMPTSP KABUPATEN KLATEN: ANALISIS MODEL EDWARDS III

Antika Rahma Wibowo¹, Catur Suwastanto², Tri Mardiana³

Program Ilmu Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani

antikawibowo@gmail.com¹, catur.pts@gmail.com², nanakecild@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten, sebagai kebijakan yang diwajibkan secara nasional melalui Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap empat informan yang dipilih melalui teknik *snowball sampling*, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman dan diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan baik melalui jalur berjenjang yang memadukan bimbingan teknis formal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten dengan rapat koordinasi internal, sehingga informasi tersampaikan secara jelas dan konsisten meskipun terjadi pembaruan kebijakan di tengah pelaksanaannya. Sumber daya, meliputi 24 staf yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta kewenangan yang diatur secara internal, mendukung operasional harian, meskipun ketidakstabilan server pusat menjadi kendala eksternal yang berada di luar kendali instansi. Disposisi pelaksana tergolong positif dan didorong oleh kepatuhan institusional, bukan oleh mekanisme insentif. Struktur birokrasi menunjukkan fragmentasi tugas yang jelas, meskipun belum tersedia SOP internal khusus SRIKANDI sehingga pelaksanaannya masih mengandalkan SOP nasional dari ANRI. Hambatan utama yang ditemukan adalah rangkap tugas antara pelayanan *front office* dengan pengelolaan naskah dinas pada sebagian staf, yang belum membebani kinerja namun tetap perlu mendapat perhatian. Penelitian ini merekomendasikan penambahan staf khusus pelayanan *front office*, sekaligus memberikan bukti empiris yang memperkaya penerapan model Edwards III pada instansi pelayanan publik tingkat kabupaten.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SRIKANDI, Edwards III, DPMPTSP

ABSTRACT

This study examines the implementation of SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Klaten Regency, a policy mandated nationally under ANRI Regulation No. 4 of 2021. A qualitative descriptive approach was applied, with data collected through observation, interviews with four informants selected through snowball sampling, and documentation study, then analyzed using the Miles and Huberman technique and validated through source triangulation. The analysis employed George C. Edwards III's policy implementation model, covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Findings show that communication has run well through tiered channels that combine formal technical guidance from the Klaten Archives and Library Office with internal coordination meetings, so that information is conveyed clearly and consistently despite policy updates. Resources, including 24 competent staff, adequate facilities, and internally regulated authority, support daily operations, although instability of the central server remains an external constraint beyond the office's control. Disposition among implementers is positive and driven by institutional compliance rather than incentive mechanisms. Bureaucratic structure shows clear task fragmentation, although no internal standard operating procedure specifically governs SRIKANDI, so implementation still relies on ANRI's national procedures. The main obstacle identified is the overlap between front-office service duties and SRIKANDI document-management tasks among certain staff, which has not yet burdened performance but warrants attention. The study recommends

dedicated front-office staffing and offers empirical evidence enriching the application of Edwards III's model at the district-level public service office.

Keywords: Policy Implementation, SRIKANDI, Edwards III, DPMPTSP

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi mendorong transformasi pengelolaan pemerintahan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik guna memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik (Asyra, 2025). Berdasarkan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, dalam Alvi, 2025), *electronic government (e-government)* dimaknai sebagai transformasi tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan dukungan teknologi elektronik, di mana teknologi berperan sebagai instrumen fasilitatif, sementara prioritas utamanya tetap pada peningkatan kualitas kinerja birokrat dan pelayanan publik. Dengan kata lain, digitalisasi bukan sekadar adopsi teknologi terkini, melainkan bagaimana teknologi tersebut mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kearsipan turut menjadi salah satu hal yang bertransformasi, mengingat pengelolaan arsip berbasis kertas menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan ruang penyimpanan, risiko kerusakan fisik, kesulitan temu kembali informasi di antara ribuan berkas, serta duplikasi dan inkonsistensi data akibat sistem pencatatan yang tidak terintegrasi (Fayruziah, dkk., 2026). Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengamankan pengelolaan arsip elektronik secara profesional dan terintegrasi, kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai wujud konkret dari kebijakan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menetapkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan SRIKANDI beserta Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang mengklasifikasikan naskah dinas yang dikelola melalui SRIKANDI ke dalam tiga kelompok, yaitu naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus.

Secara nasional, capaian Indeks Kepatuhan Kebijakan SRIKANDI pada tahun 2023 tercatat sebesar 72,98 dari target 68 (capaian 107%), sementara Indeks Ketersediaan Arsip mencapai 84,45 dari target 75 (capaian 113%), didukung oleh 685 lembaga yang telah mengadopsi SRIKANDI pada tahun 2024 (ANRI, 2024). Di tingkat daerah, kewajiban

penerapan SRIKANDI turut berlaku bagi instansi pelayanan publik seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten, yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non-perizinan satu pintu, dan telah menerapkan SRIKANDI secara resmi sejak 31 Januari 2022. Sepanjang periode Januari–Desember 2025, DPMPTSP Kabupaten Klaten tercatat mengelola sebanyak 1.557 arsip naskah dinas melalui SRIKANDI, mencakup surat keputusan, nota dinas, surat undangan internal, surat pengantar, dan surat keterangan (DPMPTSP, 2025). Karakteristik DPMPTSP sebagai lembaga yang berhadapan langsung dengan pemohon izin menghadirkan konteks implementasi yang khas, di mana tertib kearsipan digital harus tetap berjalan beriringan dengan kecepatan pelayanan kepada masyarakat, tanpa mengorbankan salah satu di antara keduanya.

Penelitian mengenai implementasi SRIKANDI dengan pendekatan model implementasi kebijakan Edwards III sebelumnya lebih banyak dilakukan pada instansi kearsipan tingkat provinsi, seperti Biro Umum Sekretariat Daerah (Tahwali, dkk., 2025), instansi vertikal seperti BKK (Rifai & Sugiyanto, 2024) dan Kantor Kementerian Agama (Taufiqurrahman & Widyakanti, 2025), kecamatan (Hadijah & Rahman, 2024), maupun lembaga non-kementerian tingkat pusat seperti BNPB (Aristriya & Tuswoyo, 2024). Sementara itu, kajian yang secara khusus menjadikan instansi pelayanan terpadu satu pintu tingkat kabupaten seperti DPMPTSP sebagai objek utama penelitian implementasi SRIKANDI dengan pendekatan Edwards III belum banyak ditemukan, meskipun sejumlah penelitian menyebutkan DPMPTSP sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang turut menerima bimbingan teknis kebijakan SRIKANDI. Kesenjangan inilah yang mendasari penelitian ini, dengan tujuan mengkaji bagaimana implementasi aplikasi SRIKANDI di DPMPTSP Kabupaten Klaten berlangsung dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.

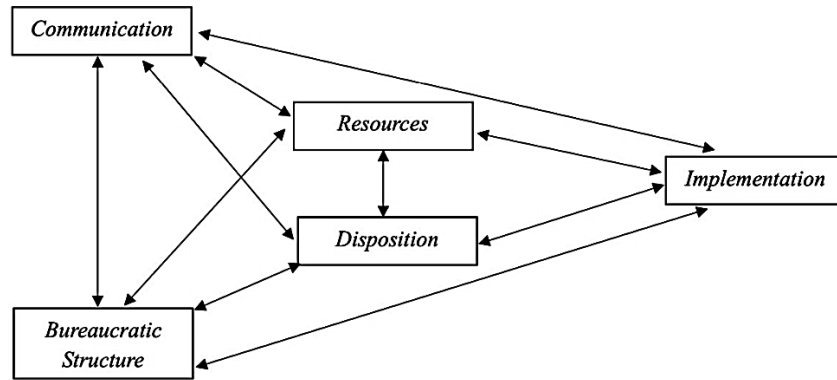
KAJIAN PUSTAKA

Implementasi merupakan konsep dengan banyak pemaknaan karena tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan (*execution*) sebuah program, tetapi berkaitan pula dengan faktor yang mempengaruhi implementasi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Implementasi juga berkaitan dengan pencapaian tujuan program yang dibentuk atau tujuan organisasi secara keseluruhan. (Jumroh & Pratama, 2021: 1). Van Meter dan Van Horn (Widiastuti, 2022: 47) berpendapat bahwa implementasi suatu program dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan ketika penyusunan program/kegiatan dan pencapaian

tujuannya dijadikan prioritas, dilaksanakan melalui tindakan individu, badan pemerintahan, maupun pihak swasta. Oleh karena itu, Pramono (2020: 22) berpendapat bahwa individu, organisasi, dan kondisi lingkungan eksternal menjadi faktor yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi, yang mana individu yang kuat tidak akan optimal apabila dukungan organisasi tidak memadai, demikian pula faktor organisasi akan terhambat apabila kondisi eksternal tidak kondusif.

Thomas R. Dye (Igirisa, 2022: 32) berpendapat bahwa kebijakan publik ialah serangkaian upaya yang dipilih oleh badan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan karena terdapat faktor dan dampak yang memengaruhi pelaksanaannya. Sejalan dengan definisi sebelumnya, Anderson (Igirisa, 2022: 32) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu langkah yang diambil oleh seseorang/sekelompok orang dalam mengatasi masalah. Menurut William Dunn (Igirisa, 2022: 35), terdapat lima tahapan dalam proses pembentukan kebijakan, yaitu (1) *Agenda Setting*, tahap perumusan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi terkait situasi tertentu yang memicu permasalahan; (2) *Forecasting*, tahap pembahasan dan pengomunikasian resiko pada masa depan terkait dibuat atau tidak dibuatnya kebijakan; (3) Rekomendasi Kebijakan, tahap pembahasan alternatif dan rekomendasi solusi yang dinilai paling tepat setelah mempertimbangkan berbagai kondisi dan situasi; (4) Monitoring Kebijakan, tahap pengawasan pelaksanaan kebijakan dengan mengumpulkan data tentang pelaksanaannya, serta mengamati kendala dalam pelaksanaannya; dan (5) Evaluasi Kebijakan, mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian tujuan, sekaligus pelaporan apabila ditemui permasalahan dalam pelaksanaannya.

Menurut Edwards III (Agustino, 2016: 136), implementasi kebijakan merupakan tahap yang menjembatani proses pembentukan kebijakan dengan hasil yang dirasakan oleh pihak yang terkena dampaknya; tanpa implementasi, kebijakan hanya menjadi dokumen tanpa makna. Warwick (Kasmad, 2018: 34) menambahkan bahwa implementasi merupakan proses interaksi yang dinamis, di mana pelaksana diharapkan mampu beradaptasi terhadap tantangan terkait tugas, lingkungan, dan koordinasi antarpelaksana. Berbagai model implementasi kebijakan telah dikembangkan, di antaranya model Van Meter dan Van Horn dengan enam variabelnya, model Mazmanian dan Sabatier yang menekankan karakteristik masalah dan kondisi lingkungan non-kebijakan, serta model Edwards III yang menyederhanakan proses implementasi ke dalam empat variabel yang saling memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (Agustino, 2016: 136). Lebih jelas, skema impementasi kebijakan menurut Edward III disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Sumber: Agustino, 2016: 141

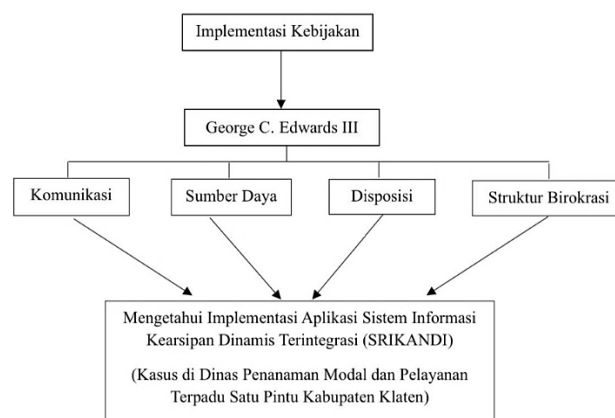
Edwards III (Agustino, 2016: 136) mengemukakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada variabel komunikasi terdiri atas tiga indikator, yaitu transmisi (penyaluran informasi), kejelasan (informasi tidak menimbulkan penafsiran ganda), dan konsistensi (kepastian perintah meski terjadi perubahan kebijakan) (Agustino, 2016: 137). Variabel sumber daya mencakup empat indikator, yaitu sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas, yang mana ketidakcukupan salah satu unsurnya dapat menghambat implementasi meskipun unsur lainnya telah terpenuhi (Agustino, 2016: 138). Variabel disposisi meliputi efek disposisi (sikap penerimaan pelaksana), pengangkatan birokrat (kesesuaian kompetensi penunjukan pelaksana), dan insentif (mekanisme penghargaan/sanksi yang mendorong kepatuhan) (Agustino, 2016: 139). Adapun variabel struktur birokrasi terdiri atas *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai pedoman baku pelaksanaan tugas, dan fragmentasi yang berkaitan dengan penyebaran tanggung jawab antarunit kerja secara proporsional (Agustino, 2016: 140–141). Dengan empat variabel tersebut, model implementasi kebijakan milik Edwards III dinilai lebih fokus pada internal organisasi, dibandingkan model Van Meter & Van Horn maupun Mazmanian & Sabatier yang lebih berorientasi pada faktor eksternal organisasi, sehingga model Edwards III dinilai relevan untuk penelitian ini karena berfokus pada dinamika internal dan teknis-administratif instansi pelaksana.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dijelaskan bahwa arsip adalah dokumentasi dari kegiatan atau kejadian yang diwujudkan dalam beragam bentuk dan media mengikuti kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dihasilkan dan diterima oleh berbagai pihak, mulai dari lembaga negara hingga masyarakat dan perorangan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan konsep tersebut, kearsipan menurut Martono dkk. (Asriel, 2018: 11) merupakan proses penerimaan, pengaturan, dan penyimpanan dokumen secara sistematis, sehingga apabila dibutuhkan

kembali dapat ditemukan dengan mudah. Selanjutnya, arsip yang berisi informasi tersebut harus disimpan dengan menggunakan sistem tertentu dan dibantu oleh perlengkapan yang memadai dan dilakukan oleh petugas kearsipan yang menguasai bidangnya. Sedangkan sistem informasi kearsipan adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk mengelola arsip secara elektronik, yang mana sistem kearsipan yang semula dilakukan secara manual diubah ke dalam sistem daring (Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020).

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) adalah sistem informasi kearsipan berbasis elektronik yang merupakan hasil kolaborasi antara ANRI, Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara, yang dirancang untuk menciptakan tata kelola arsip yang efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan (ANRI, 2021). Kebijakan SRIKANDI dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan SRIKANDI. Adapun pihak-pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021, antara lain: Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN/BUMD. SRIKANDI menjamin pengelolaan arsip dinamis yang aman, tertib, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi kinerja lembaga.

Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan milik George C. Edwards III, yang terdiri dari empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai kerangka analisis untuk menggambarkan implementasi SRIKANDI di lapangan. Adapun bagan pikir yang menunjukkan alur penelitian ini disusun sebagai berikut:



Gambar 2. Bagan Pikir

Sumber: Edwards III (Agustino, 2016: 141)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis secara mendalam dan kontekstual implementasi aplikasi SRIKANDI di

DPMPTSP Kabupaten Klaten, dengan mengungkap dinamika proses, hambatan, dan faktor pendukung secara holistik (Sugiyono, 2022: 9; Moleong, 2016: 6). Penelitian dilakukan di DPMPTSP Kabupaten Klaten yang terletak di Jl. Mayor Kusmanto, Kecamatan Klaten Tengah, dengan pertimbangan bahwa instansi ini telah diwajibkan menerapkan SRIKANDI sejak tahun 2022 dan berhadapan langsung dengan masyarakat pemohon izin, sehingga menghadirkan konteks implementasi yang unik antara tertib kearsipan dan kecepatan pelayanan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, dimulai dari admin SRIKANDI sebagai informan kunci dan berkembang berdasarkan rujukan informan sebelumnya hingga data dinilai memadai (Sugiyono, 2022: 96). Informan pada penelitian ini meliputi Admin SRIKANDI DPMPTSP Kabupaten Klaten, Admin Bidang Penanaman Modal, Admin Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta staf pelaksana. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi terhadap praktik pengelolaan arsip melalui SRIKANDI, wawancara mendalam dengan keempat informan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi instansi dan literatur pendukung (Creswell dalam Kurniullah, dkk., 2021: 115). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, yang mana menurut Norman K. Denkin (Susanto dkk., 2023), triangulasi sumber adalah teknik memverifikasi data dengan membandingkan informasi wawancara dengan dokumen yang relevan dengan topik penelitian, sehingga menghasilkan data yang lebih kredibel. Kemudian, analisis data dilakukan mengikuti tahapan Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (dalam Nasution, 2023: 132), berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan Edwards III sebagai kerangka analisis, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Variabel komunikasi digunakan untuk menganalisis bagaimana informasi kebijakan SRIKANDI disalurkan kepada pelaksana (transmisi), sejauh mana informasi tersebut dipahami tanpa menimbulkan penafsiran ganda (kejelasan), serta sejauh mana informasi tetap konsisten meski terjadi pembaruan kebijakan (konsistensi). Variabel sumber daya digunakan untuk menganalisis kecukupan staf pelaksana (sumber daya manusia), ketersediaan dan validitas informasi teknis (informasi), kejelasan pembagian hak dan tanggung jawab (kewenangan), serta ketersediaan sarana pendukung (fasilitas). Variabel disposisi digunakan untuk menganalisis sikap dan komitmen pelaksana dalam mendukung kebijakan (efek disposisi), kesesuaian kompetensi pelaksana yang ditunjuk (pengangkatan birokrat), serta ada tidaknya mekanisme penghargaan maupun sanksi yang mendorong kepatuhan (insentif). Adapun variabel struktur birokrasi digunakan untuk menganalisis ketersediaan pedoman baku pelaksanaan tugas (*Standard Operating Procedures/SOP*) serta kejelasan pembagian

tanggung jawab antar-unit kerja (fragmentasi). Keempat variabel tersebut menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana disajikan pada bagian Hasil dan Pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SRIKANDI di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten berada di bawah koordinasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten selaku instansi pembina, di mana kebijakan SRIKANDI diluncurkan secara resmi oleh Bupati Klaten pada 31 Januari 2022 (Wibowo, 2022). Di DPMPTSP Kabupaten Klaten, implementasi SRIKANDI tercermin dari *volume* naskah dinas yang dikelola secara digital, yaitu 1.557 arsip sepanjang tahun 2025, mencakup surat keputusan, nota dinas, surat undangan internal, surat pengantar, dan surat keterangan.

Secara mekanisme, SRIKANDI mengikuti alur pengelolaan naskah dinas yang telah distandarisasi secara nasional oleh ANRI, mulai dari naskah masuk hingga naskah keluar. Naskah dinas yang diterima, baik melalui *e-mail* maupun secara fisik dari kurir/jasa pengiriman, terlebih dahulu dicatat pada buku agenda kemudian diregistrasikan ke dalam SRIKANDI dengan melengkapi keterangan seperti tanggal, jenis naskah, nomor agenda, dan nama pengirim; naskah fisik yang memerlukan tindak lanjut juga dialihmediakan (*di-scan*) agar dapat diunggah ke sistem. Setelah teregistrasi, naskah dapat didisposisikan oleh pejabat berwenang kepada staf yang perlu menindaklanjutinya melalui fitur “Disposisi”, dilengkapi instruksi dan batas waktu penyelesaian, atau diteruskan ke unit kerja lain melalui fitur “Koordinasi” apabila melibatkan lebih dari satu pihak. Apabila diperlukan naskah balasan atau naskah baru, staf dapat langsung menyusunnya di dalam SRIKANDI melalui fitur teks *editor* yang telah terintegrasi tanpa aplikasi tambahan, yang kemudian diberi nomor surat secara otomatis, diverifikasi oleh pejabat berwenang, dan disahkan melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE) berbentuk *QR code* yang memiliki kekuatan hukum setara tanda tangan basah. Naskah yang telah disahkan tersebut selanjutnya dikirim melalui SRIKANDI apabila instansi tujuan telah terintegrasi dengan sistem yang sama, atau melalui surel resmi instansi apabila belum terintegrasi, dan seluruh tahapan tersebut tercatat otomatis di dalam SRIKANDI, sehingga riwayat serta status tindak lanjut setiap naskah dapat ditelusuri kembali ketika dibutuhkan.

Hasil penelitian disajikan berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Komunikasi

Transmisi informasi SRIKANDI berlangsung melalui jalur berjenjang yang bervariasi, yaitu jalur formal berupa bimbingan teknis (bimtek) dari Dispersip Kabupaten Klaten dan rapat koordinasi (Rakor) internal, maupun jalur informal berupa arahan langsung dari rekan kerja bagi staf yang bergabung setelah SRIKANDI diterapkan. Admin SRIKANDI menjelaskan bahwa informasi diperoleh melalui bimtek yang diselenggarakan Dispersip, sementara staf lain seperti Admin Bidang PTSP menyatakan, “*Dengar pertama kali soal SRIKANDI dari sekretariat... belum pernah ikut bimtek SRIKANDI*”¹, dan Admin Bidang Penanaman Modal menambahkan bahwa ia dikenalkan SRIKANDI oleh rekan kerja saat bergabung.

Dari sisi kejelasan, keempat informan menilai informasi SRIKANDI telah disampaikan dengan jelas dan didukung ruang diskusi ketika terdapat fitur yang belum dipahami. Konsistensi informasi turut terjaga baik, tercermin dari pembaruan kewenangan disposisi (dari semula hanya sekretaris dan kepala bidang menjadi mencakup sub-koordinator dan kepala sub bagian) yang tersampaikan tanpa menimbulkan kesalahpahaman.

Sumber Daya

DPMPTSP Kabupaten Klaten memiliki 24 staf yang mampu mengoperasikan SRIKANDI dengan kompetensi yang merata di seluruh bidang, tidak terpusat hanya pada admin yang ditunjuk khusus.

Dari sisi informasi, pelatihan formal bagi admin SRIKANDI hanya diberikan satu kali pada awal penunjukan, dan pengetahuan selanjutnya diteruskan melalui pembelajaran informal antarstaf. Meski begitu, keadaan ini bukan merupakan hambatan karena kompetensi staf tetap merata. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Klaten tidak memiliki dokumen teknis internal, tetapi staf dapat mencari panduan secara mandiri dari internet yang terbukti sesuai dengan *Manual Book* resmi ANRI, sehingga validitas informasi tetap terjaga.

Dari sisi kewenangan, pembagian hak dan tanggung jawab diatur berdasarkan aturan internal instansi, dengan staf bidang berperan sebagai konseptor naskah dan pejabat struktural sebagai verifikator; ditemukan pula penggabungan kewenangan lintas-peran apabila dibandingkan dengan *Manual Book* SRIKANDI, tetapi hal ini tidak menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dari sisi fasilitas, komputer, jaringan internet, dan mesin *scanner* tersedia dalam jumlah dan kondisi yang memadai; kendala yang muncul bersumber dari ketidakstabilan server

¹Wawancara dengan Heni Dwi Hastuti, Admin Bidang PTSP DPMPTSP Kabupaten Klaten, 1 Juli 2026.

pusat, yang direspons melalui mekanisme manual sementara (pembuatan naskah tetap menggunakan aplikasi pengolah kata lalu ditandatangani basah, kemudian diregistrasikan kembali ke SRIKANDI setelah sistem normal).

Disposisi

Keempat informan menunjukkan sikap dan komitmen yang positif terhadap kebijakan SRIKANDI sejak awal penerapan, didorong oleh kesadaran bahwa kebijakan pemerintah wajib didukung oleh Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana disampaikan Admin Bidang PTSP, *“Saya mendukung penuh penggunaan SRIKANDI... setelah ada SRIKANDI jadi lebih mudah”*², dan Admin Bidang Penanaman Modal menambahkan bahwa meski awalnya memerlukan penyesuaian, ia kini merasa nyaman menggunakan sistem tersebut.

Mekanisme pengangkatan pelaksana berjenjang sesuai kebutuhan, di mana penunjukan admin SRIKANDI bersifat formal melalui SK Dispersip, sementara admin bidang ditunjuk langsung oleh kepala bidang berdasarkan kompetensi.

Terkait insentif, keempat informan sepakat bahwa mekanisme penghargaan maupun sanksi formal tidak diperlukan karena pelaksanaan SRIKANDI dinilai sudah optimal, dan kekurangan cukup diselesaikan melalui teguran informal kekeluargaan, menunjukkan bahwa kepatuhan pelaksana lebih bertumpu pada motivasi intrinsik sebagai kesadaran institusional.

Struktur Birokrasi

DPMPTSP Kabupaten Klaten tidak memiliki SOP formal secara internal yang secara khusus mengatur pelaksanaan SRIKANDI, sehingga dalam pelaksanaannya mengacu pada SOP nasional. Sebagai pelengkap, Tata Naskah Dinas yang disahkan melalui Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2024 tetap menjadi acuan teknis penulisan naskah, meskipun belum secara spesifik mengatur alur penggunaan aplikasi.

Dari sisi fragmentasi, pembagian tugas antara admin SRIKANDI, verifikator naskah (Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas), dan pencatat naskah di setiap bidang berjalan jelas dan tidak tumpang tindih. Meski begitu, ditemukan bahwa Admin Bidang PTSP dan Staf Pelaksana menjalankan rangkap tugas, yaitu sebagai petugas pelayanan *front office* selain mengelola naskah dinas melalui SRIKANDI, karena tugas ini baru melekat pada jabatan mereka setelah kebijakan diterapkan pada 2022. Rangkap tugas tersebut belum dirasakan sebagai hambatan maupun beban kerja yang berarti, karena kedua fungsi selama ini masih mampu dijalankan secara optimal.

Secara keseluruhan, keempat variabel Edwards III menunjukkan implementasi SRIKANDI di DPMPTSP Kabupaten Klaten berjalan cukup baik tanpa kendala yang

²Wawancara dengan Heni Dwi Hastuti, Admin Bidang PTSP DPMPTSP Kabupaten Klaten, 1 Juli 2026.

signifikan, kecuali satu hambatan pada indikator fragmentasi, yaitu rangkap tugas. Mengingat pelayanan *front office* dan pengelolaan naskah dinas sama-sama membutuhkan perhatian penuh, terutama pada waktu dengan volume pemohon tinggi (*rush hour*), kondisi ini tetap relevan untuk diperhatikan dalam pengembangan tata kelola SRIKANDI ke depan.

Pembahasan

Pembahasan ini membandingkan temuan penelitian dengan hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi SRIKANDI pada berbagai jenis instansi. Tahwali, dkk. (2025) di Biro Umum Setda Sulawesi Tengah, dengan teori Campbell sebagai alat analisis, menemukan bahwa rendahnya komitmen pejabat dan masalah infrastruktur pusat menghambat percepatan penggunaan SRIKANDI sehingga tujuan belum tercapai. Rifai dan Sugiyanto (2024) di BKK Yogyakarta menemukan bahwa implementasi terlaksana dengan baik dan mendukung paperless-based archive, namun SDM yang kurang memadai akibat minimnya pelatihan kearsipan menjadi hambatan. Hadijah dan Rahman (2024) di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong menemukan penerapan yang relatif baik, didukung ketersediaan sumber daya, koordinasi antarorganisasi, serta dukungan lingkungan internal dan eksternal, tetapi masih terkendala gangguan server, bug pada aplikasi, dan keterbatasan kompetensi staf yang memerlukan pelatihan berkelanjutan. Taufiqurrahman dan Widyakanti (2025) di Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin menemukan implementasi yang relatif baik, dengan penciptaan arsip sesuai prosedur dan temu kembali arsip yang lebih cepat, namun terhambat kendala teknis, kurangnya motivasi kerja, kurangnya tenaga arsiparis, dan kurangnya arahan pimpinan unit kerja. Adapun Aristriya dan Tuswoyo (2024) meneliti implementasi SRIKANDI di BNPB sebagai upaya mitigasi arsip kebencanaan.

Komunikasi

Pola transmisi berjenjang di DPMPTSP Kabupaten Klaten yang memadukan bimtek dari instansi pembina dengan rakor internal dan arahan antarrekan kerja, serupa dengan temuan Taufiqurrahman dan Widyakanti (2025) di Kantor Kemenag Banjarmasin, yang menunjukkan bahwa mekanisme ini merupakan pola umum di instansi pemerintah. Peran koordinasi dengan instansi pembina juga sejalan dengan temuan Hadijah dan Rahman (2024) bahwa koordinasi antarorganisasi mendukung penerapan SRIKANDI.

Temuan tentang kejelasan sejalan dengan konsep Edwards III bahwa kejelasan mencegah penafsiran ganda (Edwards III, 1980: 26), sekaligus menunjukkan bahwa kejelasan tidak semata bergantung pada kelengkapan materi, tetapi juga pada ketersediaan ruang tanya-jawab, sebagaimana pula ditemukan Taufiqurrahman dan Widyakanti (2025).

Konsistensi informasi di DPMPTSP Kabupaten Klaten terjaga baik, berbeda dengan temuan Aristriya dan Tuswoyo (2024) di BNPB yang menemukan penyerapan pemahaman

belum merata pada tahap awal implementasi. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa skala dan kompleksitas organisasi turut memengaruhi konsistensi penyampaian kebijakan, di mana instansi berskala kabupaten relatif lebih mudah menjaga konsistensi dibandingkan lembaga berskala nasional.

Sumber Daya

Kompetensi staf DPMPTSP Kabupaten Klaten yang merata berbeda dengan temuan Taufiqurrahman dan Widyakanti (2025) di Kemenag Banjarmasin dan Hadijah dan Rahman (2024) di Kecamatan Haruai, yang menemukan kendala kompetensi akibat faktor usia pegawai senior, sehingga kesiapan SDM DPMPTSP Kabupaten Klaten tergolong relatif unggul. Pelatihan formal bagi admin SRIKANDI di DPMPTSP hanya diberikan satu kali pada awal penunjukan, tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena kompetensi staf tetap merata dan pengetahuan diteruskan melalui pembelajaran informal antarstaf. Pola ini berbeda dengan BKK Yogyakarta yang, menurut Rifai dan Sugiyanto (2024), menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara rutin setiap bulan, sebuah perbedaan yang dapat dikaitkan dengan ketersediaan arsiparis internal di BKK. Hal ini menunjukkan bahwa pada konteks ini, pelatihan berulang tidak selalu diperlukan pada instansi yang kompetensi stafnya sudah merata.

Persoalan server pusat yang ditemukan di DPMPTSP Kabupaten Klaten serupa dengan temuan Aristriya dan Tuswoyo (2024) di BNPB, Hadijah dan Rahman (2024) di Kecamatan Haruai, serta Tahwali, dkk. (2025) di Biro Umum Setda Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan infrastruktur pusat merupakan persoalan lintas-instansi yang berada di luar kendali pelaksana tingkat daerah.

Disposisi

Pola komitmen berbasis kepatuhan institusional di DPMPTSP Kabupaten Klaten sejalan dengan temuan Taufiqurrahman dan Widyakanti (2025), namun berbeda dengan temuan Tahwali, dkk. (2025) di Biro Umum Setda Sulawesi Tengah yang menemukan resistensi pimpinan level Eselon II dan III yang tetap memilih pengiriman surat manual. Perbandingan ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif pimpinan turut menentukan keberhasilan disposisi, sebagaimana tercermin dari keterlibatan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas DPMPTSP Kabupaten Klaten sebagai verifikator naskah.

Mekanisme pengangkatan pelaksana yang berjenjang sesuai kebutuhan dan kompetensi berbeda dengan temuan Taufiqurrahman dan Widyakanti (2025) yang menemukan penunjukan admin berbasis keterpaksaan situasional akibat kurangnya tenaga arsiparis. Adapun tidak diperlukannya insentif formal menunjukkan bahwa kepatuhan pelaksana lebih bertumpu pada motivasi intrinsik sebagai kesadaran institusional.

Struktur Birokrasi

Ketiadaan SOP internal sejalan dengan karakteristik SRIKANDI sebagai sistem terpusat yang telah memiliki SOP baku secara nasional dari ANRI. Kondisi ini berbeda dengan temuan Aristriya dan Tuswoyo (2024) di BNPB yang telah memiliki regulasi turunan internal berupa Instruksi Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2021, sebuah perbedaan yang dapat dipengaruhi oleh perbedaan skala kelembagaan antara instansi pusat dan OPD tingkat kabupaten. Adapun fragmentasi tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih sejalan dengan temuan Taufiqurrahman dan Widyakanti (2025) di Kemenag Banjarmasin.

Jika dilihat secara menyeluruh, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel Edwards III saling berkaitan dalam menopang implementasi SRIKANDI di DPMPTSP Kabupaten Klaten (Agustino, 2016, hlm. 136). Komunikasi yang jelas dan konsisten, sumber daya yang memadai, serta disposisi pelaksana yang positif berjalan beriringan sehingga operasional harian tetap lancar. Menariknya, disposisi yang positif tersebut tidak ditopang oleh insentif, padahal Edwards III memandang insentif sebagai mekanisme yang mendorong kepatuhan pelaksana (Agustino, 2016, hlm. 139). Di DPMPTSP, kepatuhan justru bertumpu pada kesadaran institusional sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa pada instansi yang pelaksanaannya sudah memiliki komitmen kuat, insentif formal tidak selalu menjadi faktor penentu. Di sisi lain, hambatan rangkap tugas pada indikator fragmentasi menunjukkan bahwa kelemahan pada satu unsur tetap perlu diperhatikan meskipun variabel lain telah terpenuhi.

Perbandingan Penelitian

Secara keseluruhan, implementasi SRIKANDI di DPMPTSP Kabupaten Klaten yang berjalan cukup baik sejalan dengan temuan Rifai dan Sugiyanto (2024), Hadijah dan Rahman (2024), serta Taufiqurrahman dan Widyakanti (2025) bahwa implementasi terlaksana baik atau relatif baik, dan berbeda dengan Tahwali, dkk. (2025) yang menemukan tujuan belum tercapai akibat rendahnya komitmen pejabat. Hambatan rangkap tugas antara pelayanan *front office* dan pengelolaan naskah dinas berbeda dengan hambatan yang umumnya dilaporkan penelitian terdahulu tersebut, yaitu infrastruktur, kompetensi, dan komitmen pimpinan. Temuan ini dapat dikaitkan dengan karakteristik DPMPTSP sebagai instansi pelayanan yang berhadapan langsung dengan pemohon izin, sehingga memperkaya penerapan model Edwards III pada instansi pelayanan publik tingkat kabupaten.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan aplikasi SRIKANDI di DPMPTSP Kabupaten Klaten yang dianalisis menggunakan model Edwards III secara umum telah berjalan dengan cukup baik.

Komunikasi kebijakan tersalurkan secara berjenjang melalui bimbingan teknis dari Dispersip Kabupaten Klaten dan rapat koordinasi internal, dengan tingkat kejelasan dan konsistensi yang terjaga meskipun terjadi pembaruan kebijakan di tengah pelaksanaannya. Sumber daya pendukung, meliputi kecukupan jumlah dan kompetensi staf, ketersediaan informasi teknis melalui pembelajaran informal yang tetap merujuk pada standar nasional, kejelasan kewenangan yang terbentuk melalui aturan internal dan pengalaman kerja, serta fasilitas yang memadai, meskipun ketidakstabilan server pusat tetap menjadi kendala eksternal yang berada di luar kendali instansi pelaksana. Disposisi pelaksana menunjukkan sikap dan komitmen yang positif tanpa resistensi berarti, didorong oleh kesadaran kepatuhan institusional sebagai Aparatur Sipil Negara. Struktur birokrasi menunjukkan fragmentasi tugas yang jelas antara admin, verifikasi, dan pencatat naskah, sementara ketiadaan SOP formal secara internal sejalan dengan karakteristik SRIKANDI sebagai sistem yang telah distandarisasi secara nasional oleh ANRI, sehingga pelaksanaan tugas kearsipan tetap dapat berjalan konsisten dengan merujuk pada SOP nasional dan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Adapun hambatan yang teridentifikasi terbatas pada rangkap tugas antara pelayanan *front office* dengan pengelolaan naskah dinas pada sebagian staf, yang meskipun belum membebani kinerja, tetap relevan untuk diperhatikan.

Berdasarkan hambatan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Klaten disarankan untuk mempertimbangkan penambahan staf khusus pada bagian pelayanan *front office*, agar staf yang selama ini merangkap tugas dapat lebih fokus menjalankan salah satu fungsinya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pemohon maupun pengelolaan arsip digital melalui SRIKANDI. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan hingga menjangkau unsur pimpinan struktural serta membandingkan implementasi SRIKANDI pada beberapa OPD sejenis di tingkat kabupaten, guna memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan kearsipan digital di lingkungan pemerintah daerah.

REFERENSI

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Alvi, A. K. (2025). Transformasi Digital Pengelolaan Arsip melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. *Repository UIN Suska Riau*. <https://repository.uin-suska.ac.id/91471/>
- Aristriya, D., & Tuswoyo. (2024). Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Sebagai Upaya Mitigasi Arsip Kebencanaan. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(2), 141–147. DOI: <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i2.4182>

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2024, Juni). Kearsipan Berkelanjutan untuk Masa Depan Terbaik. Majalah Arsip, Edisi 84. https://www.anri.go.id/storage/files/kearsipan_berkelanjutan_untuk_masa_depan_terbaik_edisi_842024_1732002709.pdf
- Asriel, A. S. (2018). *Manajemen Kearsipan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Asyra, T. S. (2025). Analisis Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Sekretariat Daerah Kota Batu. *Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University*. [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/78847/>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten. (2025). Data jumlah arsip DPMPTSP Kabupaten Klaten tahun 2025 [Dokumen internal instansi].
- Fayruziyah, N. S., Fauzi, A., & Mustofa, A. (2026). Transformasi Digital Dalam Manajemen Kearsipan Pemerintahan: Implementasi dan Tantangan Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi. *DIRASAH*, 9(1). DOI: <https://doi.org/10.58401/dirasah.v9i1.2847>
- Hadijah, & Rahman, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 7(2), 1386–1395. DOI: <https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1088>
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Tanah Air Beta.
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. CV. Insan Cendikia Mandiri.
- Kasmad. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. (2020).
- Kurniullah, dkk. (2021). *Metode Penelitian Sosial*. Yayasan Kita Menulis.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Cretive.
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). (2021).
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. (2021).
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas. (2024).
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2018).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Rifai, M., & Sugiyanto. (2024). Implementation of Srikandi Application: Paperless-based Digital Transformation of Archives. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 9(2), 314–326. DOI: <https://dx.doi.org/10.30829/jipi.v9i2.21476>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 52–61. DOI: <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Tahwali, N. R. J., Kalsum, U., Darmawati, D., Hastuty, D., Nawawi, M., & Haryono, D. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1), 144–153. DOI: <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i1.684>
- Taufiqurrahman, M. F., & Widyakanti. (2025). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. *Jurnal*

Administrasi Publik dan Pembangunan, 4(1), 25–36 DOI:
<https://doi.org/10.20527/jpp.v7i1.15038>

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (2009).

Wibowo, E.A. (2022, 1 Februari). Bupati Klaten Resmikan Aplikasi SRIKANDI. Derap Juang.
<https://derapjuang.id/featured/bupati-klaten-resmikan-aplikasi-srikandi/>

Widiastuti. (2022). *Kebijakan Publik*. CV. Insan Cendikia Mandiri.